
MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Model SPPG dan Tantangan Tata Kelola Publik

Saepuloh¹, Fuad Hilmi²

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Indonesia¹

UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia²

avis.saepuloh@gmail.com

Diserahkan tanggal 03 Januari 2026 | Diterima tanggal 25 Maret 2026 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2026

Abstract:

This article examines the Free Nutritious Meal Program (MBG) as a hybrid public policy instrument that integrates social nutrition intervention with local economic empowerment. The study focuses on analyzing the role and operational mechanism of the Nutrition Service Unit (SPPG) in stimulating local economic ecosystems, identifying governance challenges emerging in its implementation, and formulating strategies to strengthen oversight systems to ensure sustainability and accountability. Employing a qualitative descriptive approach through policy analysis, this research analyzes official policy documents, including the Decree of the Head of the National Nutrition Agency No. 244 of 2025, supported by relevant literature on Local Economic Development and Good Governance. The findings indicate that SPPG functions not only as a food distribution mechanism but also as a fiscal stimulus capable of generating local multiplier effects through partnerships with farmers, livestock producers, and food MSMEs. However, governance challenges such as limited digital monitoring integration, potential conflicts of interest, and performance-based audit constraints may weaken program effectiveness. The study proposes an integrated economic-oversight model to enhance transparency, accountability, and long-term structural impact.

Keywords: Free Nutritious Meal Program (MBG), Local Economic Development, Good Governance, Policy Oversight, SPPG

Abstrak :

Artikel ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen kebijakan publik hibrida yang mengintegrasikan intervensi sosial di bidang gizi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Kajian ini berfokus pada analisis peran dan mekanisme operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendorong ekosistem ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan tata kelola yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan strategi penguatan sistem pengawasan guna menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan dengan menelaah dokumen resmi, termasuk Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, serta literatur terkait Local Economic Development dan Good Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi pangan, tetapi juga sebagai stimulus fiskal yang mampu menciptakan efek pengganda ekonomi melalui kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM pangan. Namun demikian, tantangan seperti belum terintegrasinya sistem monitoring digital, potensi konflik kepentingan, dan keterbatasan audit berbasis kinerja dapat memengaruhi efektivitas program. Penelitian ini menawarkan model integrasi ekonomi-pengawasan sebagai kerangka penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Tata Kelola yang Baik, Pengawasan Kebijakan, SPPG

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan secara berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial (Dahlia, 2023, p. 64). Dalam konteks tersebut, kebijakan publik berperan sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan program pembangunan melalui intervensi yang terencana, terukur, serta didukung oleh mekanisme regulasi dan pengawasan yang memadai (Zhang & Zhang, 2023). Salah satu kebijakan strategis yang saat ini menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Sebagai program berskala nasional, MBG tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan (Kiftiyah et al., 2025, p. 107; Yurchyk et al., 2024, p. 186). Melalui model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), setiap unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, sehingga membuka peluang terciptanya aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG berpotensi menghasilkan *multiplier effect* berupa peningkatan permintaan produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat (Wardoyo et al., 2025, p. 4763).

Namun demikian, besarnya skala anggaran dan kompleksitas aktor yang terlibat menimbulkan tantangan tata kelola yang signifikan. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, program ini berisiko menghadapi inefisiensi, konflik kepentingan dalam rantai pasok, serta potensi penyimpangan anggaran (Cahya et al., 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi MBG melalui model SPPG menjadi penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya efektif dalam meningkatkan gizi, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang didukung oleh tata kelola yang baik (Hyndman & Lapsley, 2016).

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dianalisis dari berbagai perspektif, baik sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), program bantuan sosial berbasis pendidikan, maupun sebagai strategi penguatan sumber daya manusia. Penelitian Koton et al. (2025) menunjukkan bahwa MBG berkontribusi terhadap peningkatan permintaan pangan lokal serta mendorong pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja di tingkat daerah. Sementara itu, Nasir (2025) menyoroti pentingnya kebijakan afirmatif dalam belanja publik yang mampu menciptakan pasar bagi pelaku usaha lokal. Di sisi lain, Wahyuni & Prabawati (2025) menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data dalam program bantuan sosial di sektor pendidikan, sedangkan Shiddiq & Effendi (2025) memposisikan MBG sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih melihat aspek ekonomi lokal dan tata kelola program sosial secara terpisah, sehingga belum banyak kajian yang mengintegrasikan kedua dimensi tersebut dalam satu kerangka analisis kebijakan yang utuh.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* berupa keterbatasan studi yang mengkaji secara simultan hubungan antara potensi pemberdayaan ekonomi lokal dengan desain tata kelola dan sistem pengawasan MBG, khususnya melalui model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, besarnya skala anggaran dan kompleksitas program menuntut integrasi antara efektivitas distribusi manfaat dan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif berbasis perspektif *local economic development* dan *good governance* untuk menganalisis peran SPPG sebagai simpul kelembagaan strategis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya menghasilkan manfaat sosial berupa peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga

mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal melalui keterlibatan pelaku usaha daerah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme SPPG dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, mengidentifikasi tantangan tata kelola yang muncul dalam implementasi program MBG, serta merumuskan strategi penguatan sistem pengawasan guna mendukung keberlanjutan dan akuntabilitas program.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kebijakan (*policy analysis*) untuk memahami secara komprehensif posisi dan peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal serta tantangan tata kelolanya (Lasswell, 1999; Purwono et al., 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah substansi kebijakan, konstruksi kelembagaan, serta dinamika implementasi program secara mendalam dalam konteks regulatif dan administratif. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana desain kebijakan, struktur kewenangan, serta mekanisme operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membentuk pola distribusi manfaat ekonomi sekaligus memengaruhi efektivitas sistem pengawasan program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dengan menelaah berbagai sumber kebijakan dan literatur yang relevan. Sumber data utama penelitian ini meliputi dokumen regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan MBG, termasuk Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, pedoman teknis pelaksanaan program, serta dokumen kebijakan lain yang berkaitan dengan tata kelola dan mekanisme pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi akademik yang membahas pemberdayaan ekonomi lokal dan tata kelola kebijakan publik sebagai sumber data pendukung guna memperkuat kerangka analisis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi norma, prinsip, dan ketentuan yang mengatur implementasi MBG. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan dan seleksi dokumen kebijakan yang relevan dengan implementasi MBG; (2) klasifikasi substansi kebijakan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, mekanisme operasional SPPG, serta sistem pengawasan program; (3) analisis konten kebijakan untuk mengidentifikasi pola pengaturan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi lokal dan tata kelola program; serta (4) interpretasi temuan menggunakan kerangka teori *Local Economic Development* dan *Good Governance*. Tahapan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana desain kebijakan MBG mampu mendorong keterlibatan ekonomi lokal sekaligus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan keandalan interpretasi terhadap substansi kebijakan yang dianalisis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kekuatan desain kebijakan MBG, potensi celah dalam tata kelola program, serta rekomendasi strategis untuk penguatan sistem pengawasan berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas.

PEMBAHASAN

MBG sebagai Motor Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana diatur dalam SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya dirancang sebagai

intervensi gizi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis wilayah. Secara normatif, kebijakan ini memuat arah strategis pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pengelolaan anggaran publik dalam skala besar melalui skema SPPG. Untuk memetakan keterkaitan kebijakan dengan teori *Local Economic Development* (LED) dan prinsip *Good Governance*, tabel 1 berikut disajikan analisis komparatif berbasis substansi kebijakan.

Tabel 1. Substansi Kebijakan (Kutipan Langsung SK 244/2025)

Aspek Teoritis	Substansi Kebijakan (Kutipan Langsung SK 244/2025)	Analisis Keterkaitan
Local Economic Development (Optimalisasi Sumber Daya Lokal)	“Pengadaan bahan baku harus menggunakan produk yang dihasilkan oleh UMKM, BUMDes, Koperasi (termasuk Kopdes Merah Putih), peternakan rakyat, nelayan, dan usaha masyarakat lokal lainnya di sekitar SPPG.”	Menunjukkan keberpihakan pada rantai pasok lokal dan penguatan ekonomi berbasis komunitas, selaras dengan prinsip LED yang menekankan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal.
LED (Kemitraan Multipihak)	“Kegiatan program MBG dilakukan dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan lintas sektor baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga sekolah dan posyandu.”	Mencerminkan model kolaboratif antara pemerintah pusat-daerah dan masyarakat, sesuai konsep kemitraan dalam pembangunan ekonomi lokal.
LED (Penciptaan Lapangan Kerja & Multiplier Effect)	“Program MBG ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, energi terbarukan, logistik dan pengolahan makanan.”	Mengindikasikan adanya efek pengganda ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sebagai outcome kebijakan.
Good Governance (Akuntabilitas Anggaran)	“Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN TA 2025... Total Bantuan Makan Bergizi Tahun Anggaran 2025: Rp. 51.524.997.720.000.”	Transparansi alokasi anggaran menunjukkan prinsip akuntabilitas fiskal, meskipun efektivitas pengawasannya tetap menjadi isu krusial.
Good Governance (Standar & Evaluasi Kinerja)	“Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan keputusan dilanjutkan operasional atau dihentikan permanen berdasarkan hasil evaluasi stand-by readiness dan pemenuhan standar SPPG oleh Mitra.”	Memuat mekanisme evaluasi dan kontrol administratif sebagai bentuk pengendalian internal.
Good Governance (Transparansi Harga & Pengawasan Pasar)	“Perlu digunakan referensi survei harga pasar terhadap bahan pangan yang digunakan di SPPG, melalui pengecekan langsung ke pasar-pasar lokal terdekat.”	Mendorong transparansi harga dan pencegahan mark-up dalam pengadaan bahan pangan.
LED & Governance (Akses Permodalan)	“Peran bank BUMN melalui KUR akan menambah kuatnya permodalan BUMDesa dan Koperasi Desa...”	Integrasi kebijakan fiskal dan pembiayaan memperkuat ekosistem ekonomi desa sekaligus menuntut tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual dan normatif, desain kebijakan MBG telah memuat elemen-elemen yang selaras dengan teori *Local Economic Development*, terutama dalam aspek pemberdayaan pelaku usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem ekonomi desa. Pada saat yang sama, kebijakan ini juga mengintegrasikan prinsip *Good Governance* melalui pengaturan alokasi anggaran, mekanisme evaluasi operasional, standar kinerja SPPG, serta kewajiban survei harga pasar sebagai instrumen transparansi. Namun demikian, besarnya total anggaran sebesar Rp51,5 triliun serta target pembentukan sekitar 25.000 SPPG di 38 provinsi menunjukkan kompleksitas implementasi yang tinggi, sehingga efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada desain normatifnya, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan dan penguatan sistem pengawasan di tingkat operasional. Dengan demikian, MBG berpotensi menjadi motor pemberdayaan ekonomi lokal apabila prinsip LED dan *good governance* tidak hanya berhenti pada tataran regulatif, tetapi diinternalisasi secara nyata dalam praktik tata kelola SPPG.

Tantangan Tata Kelola dan Pengawasan

Meskipun secara normatif kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memuat prinsip pemberdayaan ekonomi lokal serta elemen *good governance*, desain kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah kelemahan struktural yang berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi program. Skala anggaran yang besar, luasnya cakupan wilayah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta keterlibatan banyak aktor lintas sektor menjadikan MBG sebagai program dengan kompleksitas tata kelola yang tinggi. Dalam konteks kebijakan publik berskala besar, desain kelembagaan yang tidak sepenuhnya disertai dengan sistem pengawasan yang adaptif dapat menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap kelemahan desain kebijakan dan potensi risiko implementasi menjadi penting untuk memastikan bahwa program tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga mampu berjalan secara akuntabel dalam praktik.

Berdasarkan pemetaan kebijakan dan analisis terhadap desain kelembagaan SPPG, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan potensi kelemahan desain kebijakan sekaligus risiko implementasi program. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan sistem monitoring, mekanisme pengadaan bahan pangan lokal, model audit program, serta tingkat partisipasi publik dalam pengawasan, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Ttangan Tata Kelola dan pengawasan

No	Aspek Tantangan	Uraian Permasalahan	Implikasi terhadap Program	Kebutuhan Penguatan
1	Sistem Monitoring	Sistem monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan real-time antar level pusat–daerah–SPPG.	Risiko keterlambatan pelaporan, inkonsistensi data, serta lemahnya deteksi dini terhadap penyimpangan.	Pengembangan platform digital terintegrasi, dashboard nasional, dan pelaporan berbasis data real-time.

2	Potensi Konflik Kepentingan Supplier	Kewajiban penggunaan UMKM/BUMDes/Koperasi lokal berpotensi membuka ruang intervensi kepentingan dalam penunjukan pemasok.	Risiko praktik non-kompetitif, mark-up harga, atau kolusi lokal yang melemahkan prinsip transparansi.	Standarisasi prosedur pengadaan, verifikasi berbasis harga pasar, dan publikasi daftar supplier secara terbuka.
3	Audit Berbasis Kepatuhan	Audit cenderung berfokus pada aspek administratif dan serapan anggaran, belum sepenuhnya berbasis kinerja dan dampak.	Dampak ekonomi lokal dan outcome sosial program tidak terukur secara komprehensif.	Implementasi audit berbasis kinerja (<i>performance-based audit</i>) dan pengukuran multiplier effect ekonomi lokal.
4	Partisipasi Publik Terbatas	Mekanisme pengawasan masyarakat belum terlembagakan secara sistematis dan mudah diakses.	Lemahnya kontrol sosial dan minimnya transparansi di tingkat operasional SPPG.	Penyediaan kanal pengaduan publik, pelibatan komunitas lokal, dan transparansi laporan operasional.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan MBG tidak sepenuhnya terletak pada tujuan program, melainkan pada desain tata kelola operasional yang belum sepenuhnya mengantisipasi kompleksitas implementasi di lapangan. Misalnya, kewajiban pemberdayaan ekonomi lokal melalui penggunaan supplier dari UMKM, koperasi, atau BUMDes pada prinsipnya sejalan dengan pendekatan *local economic development*. Namun, tanpa mekanisme pengadaan yang transparan dan standar verifikasi yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau praktik non-kompetitif dalam penunjukan pemasok bahan pangan. Demikian pula, sistem monitoring yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dapat menghambat pengawasan terhadap aliran anggaran dan distribusi manfaat program, terutama mengingat skala operasional SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

Risiko implementasi program MBG terletak pada kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dan kapasitas sistem pengawasan operasional di lapangan. Tanpa penguatan pada aspek monitoring digital, transparansi pengadaan, audit berbasis kinerja, serta partisipasi publik dalam pengawasan, potensi ekonomi lokal yang diharapkan dari program ini dapat mengalami distorsi atau tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan sistem pengawasan menjadi prasyarat penting agar MBG benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Model Integrasi Ekonomi–Pengawasan MBG

Model Integrasi Ekonomi–Pengawasan MBG dirancang untuk menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar skema distribusi bantuan pangan, melainkan sebuah sistem kebijakan yang menghubungkan regulasi nasional, operasional kelembagaan SPPG, ekosistem ekonomi lokal, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Pada tingkat hulu, regulasi nasional melalui Badan Gizi Nasional dan SK Nomor 244 Tahun 2025 menjadi landasan normatif yang menetapkan standar operasional, pola penganggaran, serta kewajiban pemberdayaan pelaku usaha lokal. Regulasi ini kemudian diimplementasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai simpul utama distribusi anggaran dan operasional program di tingkat daerah.

Diagram 1. Diagram Model Integrasi Ekonomi–Pengawasan MBG

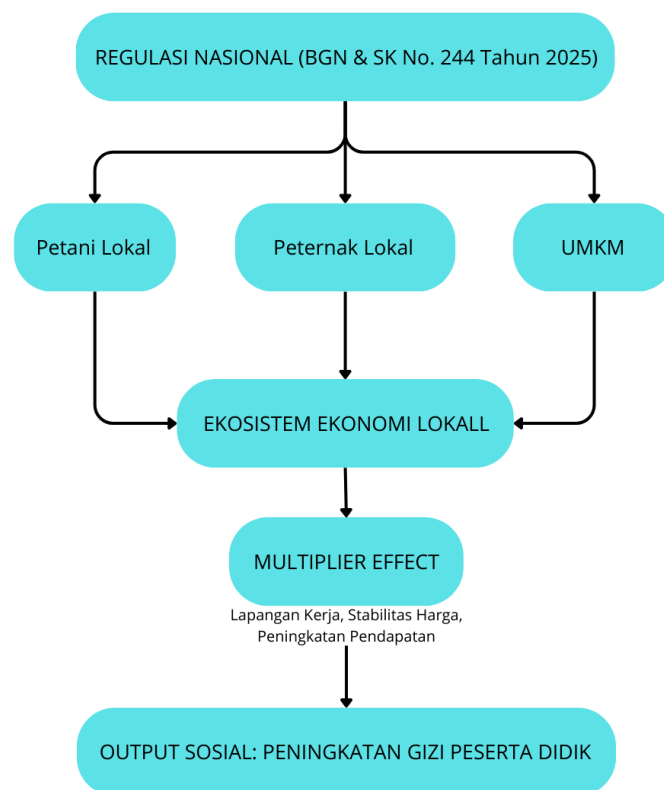


Diagram 1 diatas, pada level operasional, SPPG berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaku ekonomi lokal seperti petani, peternak, dan UMKM pangan. Kewajiban pengadaan bahan baku dari pelaku usaha lokal membentuk suatu ekosistem ekonomi yang terintegrasi, di mana aliran dana publik tidak berhenti pada konsumsi program, melainkan berputar dalam rantai nilai lokal. Integrasi ini berpotensi menghasilkan *multiplier effect* berupa penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga komoditas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kapasitas produksi lokal (Syahiddin et al., 2024, p. 887). Dalam jangka panjang, efek ekonomi tersebut berkontribusi pada output sosial berupa peningkatan status gizi peserta didik dan kelompok rentan, yang selanjutnya memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Diagram 2. Model Sistem Pengawasan Terintegrasi MBG

Namun demikian, model pada diagram 2 ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pada lapisan yang paralel dan menopang keseluruhan struktur, diperlukan sistem pengawasan terintegrasi yang mencakup pelaporan digital secara *real-time*, audit berbasis kinerja (bukan hanya kepatuhan administratif), mekanisme *whistleblowing system*, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kontrol sosial (Suratman et al., 2024, p. 2919). Sistem pengawasan ini berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif untuk memastikan bahwa distribusi anggaran tetap transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, keberhasilan MBG ditentukan oleh keseimbangan antara dua pilar utama: distribusi ekonomi lokal dan pengawasan yang akuntabel. Tanpa pengawasan yang terintegrasi, efek pengganda ekonomi berisiko terdistorsi oleh inefisiensi atau konflik kepentingan. Sebaliknya, tanpa desain ekosistem ekonomi lokal yang kuat, MBG berpotensi menjadi program konsumtif jangka pendek tanpa dampak struktural terhadap pembangunan daerah. Model integratif ini menegaskan bahwa tata kelola dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan simultan agar MBG mampu memberikan manfaat sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Untuk memperkuat kerangka analisis implementasi kebijakan, penelitian ini merumuskan Model Konseptual Analitis Integrasi Ekonomi–Pengawasan MBG sebagai sintesis antara teori *Local Economic Development* (LED) dan prinsip *Good Governance*. Model pada tabel 3 di bawah ini memetakan keterkaitan antara input kebijakan, struktur kelembagaan, proses pemberdayaan ekonomi lokal, output sosial, hingga mekanisme tata kelola dan pengawasan publik dalam satu alur sistemik. Dengan demikian, MBG tidak diposisikan semata sebagai program distribusi bantuan pangan, melainkan sebagai sistem kebijakan yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang saling terhubung. Pendekatan ini penting mengingat program MBG mengelola sumber daya fiskal yang besar serta melibatkan jaringan aktor yang luas mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku ekonomi lokal seperti petani, peternak, dan pelaku UMKM pangan.

Tabel 3. Model Konseptual Analitis Integrasi Ekonomi–Pengawasan MBG

Dimensi Analisis	Variabel Utama	Indikator Operasional	Dampak yang Diharapkan	Instrumen Pengendalian
Input Kebijakan	Anggaran MBG (\pm Rp1 Miliar/SPPG/Bulan)	Besaran alokasi dana, mekanisme penyaluran, kepastian pencairan	Ketersediaan sumber daya finansial yang memadai dan berkelanjutan	Regulasi teknis, juknis operasional, DIPA

Struktur Kelembagaan	SPPG, Yayasan Mitra, Supplier Lokal	Pola kemitraan, sistem kontraktual, standar operasional mitra	Stabilitas pasokan pangan dan efisiensi distribusi	Standarisasi mitra, verifikasi administratif dan teknis
Pemberdayaan Ekonomi Lokal (LED)	Kemitraan petani, peternak, UMKM	Proporsi belanja lokal, jumlah mitra lokal, diversifikasi supplier	<i>Multiplier effect</i> ekonomi, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja	Kontrak oftaker, evaluasi berkala, survei harga pasar
Output Sosial	Kualitas gizi peserta didik dan kelompok rentan	Standar menu, frekuensi distribusi, cakupan penerima manfaat	Peningkatan status gizi dan kualitas sumber daya manusia	Monitoring kualitas pangan, pengawasan distribusi
Tata Kelola (<i>Good Governance</i>)	Transparansi dan akuntabilitas	Laporan keuangan periodik, audit internal, publikasi data	Efektivitas program dan legitimasi publik	Sistem pelaporan digital terintegrasi
Pengawasan Publik	Kontrol sosial dan partisipasi	Mekanisme pengaduan, <i>whistleblowing system</i> , forum komunitas	Pencegahan penyimpangan dan peningkatan integritas	Audit independen dan partisipatif

Model konseptual tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada integrasi antara sistem ekonomi lokal dan mekanisme tata kelola yang efektif. Dalam perspektif *Local Economic Development*, keterlibatan petani, peternak, serta pelaku UMKM dalam rantai pasok MBG dapat menciptakan efek pengganda ekonomi melalui peningkatan permintaan produk lokal, stabilitas pasar pangan daerah, serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, kebijakan afirmasi terhadap pelaku usaha lokal juga berpotensi menimbulkan risiko implementasi seperti *elite capture* atau praktik *rent seeking* dalam proses pengadaan bahan pangan (Fitriani, 2021, p. 91). Kondisi ini dapat terjadi apabila penunjukan pemasok didominasi oleh kelompok tertentu atau apabila proses pengadaan tidak didukung oleh mekanisme transparansi dan verifikasi harga yang jelas.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa program *school feeding* yang terintegrasi dengan ekonomi lokal membutuhkan desain tata kelola yang kuat agar manfaat ekonominya tidak terdistorsi. Program *National School Feeding Programme* di Brazil, misalnya, mewajibkan setidaknya 30 persen bahan pangan sekolah dibeli langsung dari petani kecil lokal. Kebijakan ini terbukti mampu memperkuat ekonomi pertanian lokal, namun keberhasilannya ditopang oleh sistem pengawasan yang relatif ketat, termasuk transparansi pengadaan dan keterlibatan komunitas dalam pemantauan distribusi pangan (Azevedo et al., 2023, p. 3338). Sementara itu, inisiatif *Home-Grown School Feeding Programme* di beberapa negara Afrika menunjukkan bahwa integrasi antara program pangan sekolah dengan produksi pertanian lokal dapat meningkatkan pendapatan petani kecil serta memperkuat ketahanan pangan daerah (Okolo-Obasi & Uduji, 2024, p. 995). Namun, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dapat menimbulkan masalah seperti ketidakteraturan pasokan, inefisiensi distribusi, serta potensi penyimpangan dalam pengadaan pangan.

Dalam konteks tersebut, implementasi MBG melalui model SPPG memiliki kesamaan karakteristik dengan berbagai program *school feeding* di negara berkembang, yakni memanfaatkan belanja publik sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun demikian, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang mendukungnya. Tanpa integrasi antara sistem pengawasan digital, audit berbasis kinerja, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan program, potensi efek pengganda ekonomi yang diharapkan dari MBG dapat mengalami distorsi atau tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, model integrasi ekonomi–pengawasan yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi distribusi ekonomi dan sistem pengawasan publik sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan program.

Hasil ini konsisten dengan temuan Yosef P. Koton dkk. (2025) yang menunjukkan kontribusi MBG terhadap permintaan pangan lokal dan penciptaan kerja, serta sejalan dengan Nasir (2025) yang menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dan digitalisasi dalam memperkuat UMKM; namun penelitian ini memperluasnya dengan menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan terintegrasi, efek ekonomi tersebut berisiko terdistorsi oleh inefisiensi dan konflik kepentingan. Di sisi lain, temuan mengenai potensi kelemahan transparansi dan akurasi data memperkuat hasil Wahyuni & Prabawati (2025) tentang pentingnya tata kelola lintas lembaga, sekaligus mengafirmasi kekhawatiran Shiddiq & Effendi (2025) terkait risiko tata kelola MBG. Dengan demikian, penelitian ini tidak membantah studi sebelumnya, melainkan memperkuat dan mensintesiskannya melalui model kebijakan hibrida yang mengintegrasikan dimensi ekonomi lokal dan sistem pengawasan berbasis *good governance*; oleh karena itu, direkomendasikan kepada Badan Gizi Nasional dan pengelola SPPG untuk membentuk unit pengawasan independen berbasis audit kinerja, menerapkan pelaporan digital real-time yang transparan, memperluas kemitraan terverifikasi dengan pelaku ekonomi lokal, serta membuka ruang partisipasi publik guna menjaga legitimasi dan efektivitas program secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki peran strategis sebagai instrumen yang tidak hanya menjalankan distribusi program MBG, tetapi

juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha daerah dalam rantai pasok pangan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola program, khususnya dalam aspek monitoring, transparansi pengadaan, serta sistem audit dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam melihat MBG sebagai kebijakan yang menghubungkan dimensi sosial dan ekonomi secara simultan. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, sehingga belum mencakup pengujian empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif guna memperkuat validitas temuan serta memperluas pemahaman mengenai efektivitas implementasi MBG dalam konteks yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azevedo, A. B. C. de, Bandoni, D. H., Amorim, A. L. B. de, & Canella, D. S. (2023). Evaluation of food purchasing in the Brazilian school feeding programme: Feasibility of the requirements and recommendations. *Public Health Nutrition*, 26(12), 3331–3342. <https://doi.org/10.1017/S136898002300229X>
- Cahaya, D. A. D., Tarigan, J. S. R., & Rivaldo, T. (2021). Urgensi open government melalui inisiatif open data dalam mencegah korupsi anggaran penanganan COVID-19 di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 33–57. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.503>
- Dahlia, N. (2023). Upaya mewujudkan good governance melalui collaboration governance pada pelayanan publik. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 61–79. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2274>
- Fitriani, D. R. (2021). Praktek rent seeking (pemburu rente): Praktek politik dan bisnis di kalangan birokrasi. *The World of Financial Administration Journal*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i2.1196>
- Hyndman, N., & Lapsley, I. (2016). New public management: The story continues. *Financial Accountability & Management*, 32(4), 385–408. <https://doi.org/10.1111/faam.12100>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Koton, Y. P., Nusi, D., & Djaba, M. (2025). Kontribusi program makanan bergizi gratis (MBG) terhadap ekonomi lokal di Provinsi Gorontalo. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JLAMS)*, 2(2), 110–118.
- Lasswell, H. D. (1999). The policy orientation. In D. Lerner & H. D. Lasswell (Eds.), *The science of public policy: Evolution of policy sciences* (pp. 1–28). Routledge.
- Nasir, M. (2025). Dampak kebijakan publik terhadap resiliensi dan eskalasi UMKM di Kota Makassar: Studi kebijakan afirmatif, transformasi spasial, dan digitalisasi ekonomi (2020–2025). *Kaizen: Kajian Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Kewirausahaan*, 4(2), 1–11.
- Okolo-Obasi, N. E., & Uduji, J. I. (2024). The impact of national home-grown school feeding programme (NHGSFP) on rural communities in Nigeria. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 40(5), 988–1005. <https://doi.org/10.1108/JEAS-10-2021-0211>
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniarmoko, R. (2019). *Metodologi penelitian (kuantitatif, kualitatif dan mix method)*. Guepedia.

- Shiddiq, F., & Effendi, G. N. (2025). Strategic challenges and optimization strategies for human resource development through Indonesia's free nutritious meal program. *Society*, 13(2), 1037–1055. <https://doi.org/10.33019/society.v13i2.943>
- Suratman, S., Sayidah, N., & Ady, S. U. (2024). Implementasi unsur-unsur maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dalam meningkatkan level maturitas SPIP. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2917–2928. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13429>
- Syahiddin, M., Haryanto, & Wibowo, P. A. (2024). Evaluasi penduduk angkatan kerja, produk domestik bruto, pertumbuhan pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif terhadap kinerja perekonomian di Provinsi Bali. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 879–907. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1274>
- Wahyuni, M. D. T., & Prabawati, I. P. A. (2025). Transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran program Indonesia pintar: Studi kasus sekolah dasar di Kecamatan Kuta Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15651038>
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Gaffar, M. A. (2025). Analisis kebijakan peraturan Badan Gizi Nasional RI Nomor 2 Tahun 2024: Implikasi penguatan kepemimpinan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi melalui pendidikan dasar militer di Pusat Pendidikan Infanteri. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(3), 4761–4776. <https://doi.org/10.58230/27454312.1963>
- Yurchyk, H., Mishchuk, H., Bilan, S., & Skare, M. (2024). Social expenditure multiplier: Assessment of economic effect and optimal values. *Economics & Sociology*, 17(1), 182–195. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2024/17-1/12>
- Zhang, J., & Zhang, Z. (2023). Ethics and governance of trustworthy medical artificial intelligence. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 23(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s12911-023-02103-9>